



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI I DPR RI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)**

---

Rapat ke : 7 (tujuh)  
Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas)  
Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2017  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Menkominfo, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai dukungan PNBPN sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)  
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI  
2. a. Menkominfo, Rudiantara;  
b. Menteri Keuangan, diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan, Dr. Mardiasmo, MBA;  
c. Menteri PPN/Kepala Bappenas, diwakili oleh Dep. Bidang Sarana dan Prasarana Kemen PPN/Bappenas, Ir. Wismana Adi Suryabrata, M.IA.; beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan *rebalancing* (realokasi) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk penambahan anggaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah kewajiban pelayanan universal yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kemkominfo.
2. Komisi I DPR RI mendukung Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan program pembangunan TIK dalam bentuk pembangunan Palapa Ring, *Base Transceiver Station* (BTS), akses internet, pembentukan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengadaan satelit percepatan akses internet.
3. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk menetapkan prioritas desa, kecamatan, lokasi prioritas di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan desa tertinggal di luar 3T.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Jakarta, 28 November 2017

**KETUA RAPAT,**

**TTD**

**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**

**A-111**